

ANALISIS NILAI KERAKYATAN PADA ORGANISASI KAMPUS: PEMILIHAN KETUA YANG TIDAK SESUAI MUSYAWARAH

Ezra Parida Sitinjak^{1*}, Intan Dwi Angel Panjaitan², Nurul Afni³,
Syahriani Nasution⁴, Tia Septy Monica Sinaga⁵

¹⁻⁵ Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

*Corresponding author: ezra.4243121016@mhs.unimed.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai demokrasi, khususnya prinsip musyawarah sebagaimana tercantum dalam sila keempat Pancasila, dalam proses pemilihan ketua organisasi mahasiswa. Latar belakang penelitian ini muncul dari temuan bahwa beberapa proses pemilihan kepemimpinan tidak sepenuhnya melibatkan musyawarah, tetapi didominasi oleh kelompok tertentu dengan ruang dialog yang sangat terbatas. Penelitian ini menggunakan metode sosialisasi dan wawancara untuk menggali pemahaman mahasiswa serta menilai sejauh mana nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam pengambilan keputusan organisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan penjelasan dan pertanyaan lisan terkait konsep musyawarah, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai pengalaman mahasiswa dalam proses pemilihan ketua organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian mahasiswa memahami pentingnya musyawarah, praktik di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan partisipasi. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan budaya dialog dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif agar nilai-nilai demokrasi dapat terwujud dengan baik dalam kehidupan organisasi kampus.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Musyawarah, Nilai-Nilai Demokrasi, Organisasi Mahasiswa

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of democratic values, particularly the principle of deliberation as stated in the fourth principle of Pancasila, in the process of electing student organization leaders. The background of this research arises from findings that some leadership elections do not fully involve deliberation but are dominated by certain groups with limited opportunities for dialogue. This study employs socialization and interviews to explore students' understanding and to assess the extent to which democratic values are applied in organizational decision-making. Socialization activities provide explanations and oral questions related to deliberation, while interviews gather in-depth information about students' experiences in leader elections. The results show that although some students

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No
234.KK.443

Prefix DOI :

0.9765/Krepa.V218.37841

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

understand the importance of deliberation, the practice in the field has not fully reflected the principles of justice, equality, and participation. This study emphasizes the need to enhance a culture of dialogue and more inclusive decision-making so that democratic values can be realized within campus organizational life.

Keywords: *Civic Education, Deliberation, Democratic Values, Student Organization*

PENDAHULUAN

Organisasi kemahasiswaan merupakan ruang strategis bagi mahasiswa untuk mengembangkan karakter, kemampuan kepemimpinan, serta keterampilan berdemokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks kehidupan kampus, proses pemilihan ketua organisasi menjadi salah satu praktik demokrasi paling nyata yang dapat membentuk cara pandang mahasiswa terhadap kepemimpinan, partisipasi, serta tanggung jawab politis. Namun, idealisme tersebut tidak selalu tercermin dalam kenyataan. Beberapa proses pemilihan ketua organisasi justru menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai kerakyatan yang seharusnya menjadi landasan moral bagi seluruh kegiatan pengambilan keputusan di perguruan tinggi.

Pemilihan ketua organisasi kampus yang tidak melalui proses musyawarah yang adil menunjukkan penyimpangan dari nilai kerakyatan yang menuntut kesetaraan suara, dialog terbuka, dan pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan bersama. Prinsip musyawarah dalam demokrasi permusyawaratan menekankan bahwa setiap anggota berhak menyampaikan pendapat tanpa tekanan, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi moral dan etis. Ketika pemilihan dilakukan secara tertutup, dimonopoli kelompok tertentu, atau diarahkan pada calon yang sudah ditentukan, proses tersebut kehilangan nilai pendidikan politik yang seharusnya menjadi inti organisasi mahasiswa. Situasi ini bukan hanya merusak budaya demokrasi di lingkungan kampus, tetapi juga menghambat pembentukan sikap kritis dan partisipatif yang diperlukan generasi muda dalam kehidupan bernegara (Megawati, 2024).

Pengambilan Keputusan oleh Pemimpin dalam Menciptakan Komitmen Organisasi, dapat dipahami bahwa kualitas sebuah keputusan sangat ditentukan oleh peran pemimpin, kemampuan memahami situasi, serta bagaimana pemimpin melibatkan anggota dalam proses tersebut. Jurnal tersebut menegaskan bahwa keputusan yang baik lahir dari keterlibatan bersama, komunikasi yang efektif, serta desain keputusan yang terstruktur sehingga tidak menimbulkan kecemasan, salah paham, atau ketidakpuasan dalam organisasi. Organisasi kampus, dampak dari pemilihan tanpa musyawarah bisa serupa: anggota merasa tidak terlibat, muncul konflik internal, ada ketidakpercayaan pada pemimpin terpilih, dan hilangnya komitmen untuk bekerja sama. (Suandika & Gorda, 2024).

Nilai kerakyatan menekankan prinsip musyawarah, partisipasi, dan keterlibatan seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan. Namun, dalam konteks organisasi kampus, sering muncul persoalan ketika pemilihan ketua dilakukan tidak melalui musyawarah yang terbuka dan demokratis. Proses tersebut menjadi tidak partisipatif, hanya melibatkan kelompok tertentu, atau bahkan ditentukan sepihak tanpa melibatkan anggota secara menyeluruh. Ketidaksesuaian dengan prinsip musyawarah ini menunjukkan lemahnya integritas moral organisasi, karena keputusan tidak mencerminkan aspirasi kolektif. Seperti halnya temuan jurnal bahwa pengambilan keputusan pemerintah yang kurang melibatkan masyarakat, kondisi di organisasi kampus juga memperlihatkan minimnya peran anggota dalam menyepakati keputusan penting. Akibatnya, legitimasi kepemimpinan menjadi lemah dan menurunkan kepercayaan anggota terhadap organisasi. Untuk membangun nilai kerakyatan yang sejati, proses pemilihan ketua

organisasi kampus harus dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang inklusif, transparan, dan melibatkan seluruh anggota. Keterlibatan kolektif bukan hanya meningkatkan kualitas keputusan, tetapi juga memperkuat budaya demokratis dan rasa memiliki terhadap organisasi (Darmawati, et al, 2023).

Peran Pemimpin dalam Pengambilan Keputusan menyoroti bahwa pemimpin memiliki posisi kunci dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Baik dalam lembaga pendidikan maupun organisasi lainnya, pemimpin tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin yang bijak tidak hanya memberi instruksi, tetapi turut berkontribusi secara aktif untuk mencapai visi bersama. Pemimpin dipilih karena dianggap memiliki wawasan, kemampuan, kreativitas, serta tanggung jawab yang lebih besar daripada anggota lainnya. Peran penting ini mencakup kemampuan memengaruhi, memotivasi, dan mendorong anggota agar dapat bekerja sama secara positif dalam mencapai target organisasi (Jannah, dkk, 2024).

Organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting sebagai wadah pembelajaran nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya nilai kerakyatan yang dijalankan melalui musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Musyawarah mufakat dianggap lebih sesuai dengan nilai demokrasi Pancasila dibandingkan dengan voting yang hanya mengutamakan suara terbanyak, karena musyawarah menekankan pada kepentingan bersama, tanggung jawab, dan akal sehat. Pemilihan ketua yang tidak sesuai dengan musyawarah mencerminkan penyimpangan dari prinsip demokrasi Pancasila, karena keputusan yang hanya berdasarkan voting mayoritas dapat menyebabkan dominasi kelompok tertentu dan mengabaikan keadilan bagi seluruh anggota (Taqiuddin, dkk, 2023).

Nilai kerakyatan dalam Sila Keempat Pancasila menekankan bahwa keputusan bersama harus dibangun melalui musyawarah yang jujur, dialog terbuka, dan partisipasi setara dari semua anggota. Musyawarah bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah proses yang mengedepankan kebijaksanaan, akal sehat, serta kepentingan bersama. Nilai ini menjadi sangat penting karena kampus adalah lingkungan akademik yang bertugas membentuk generasi muda yang berkarakter demokratis dan berintegritas. Pemimpin organisasi kampus seharusnya dipilih berdasarkan proses yang adil, terbuka, dan memiliki legitimasi moral yang kuat.

Namun, fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian organisasi mahasiswa belum sepenuhnya menjalankan nilai kerakyatan tersebut. Beberapa pemilihan ketua organisasi berlangsung tanpa dialog yang memadai, dikuasai oleh kelompok tertentu, atau minim transparansi. Bahkan, dalam beberapa kasus di kampus lain yang diberitakan secara nasional, muncul dugaan praktik tidak etis seperti pemberian imbalan atau tekanan terhadap pemilih. Fenomena-fenomena ini mencerminkan melemahnya internalisasi nilai Pancasila di kalangan mahasiswa, serta adanya pengaruh budaya politik pragmatis yang mulai merasuki lingkungan akademik.

Selain itu, beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Putri (2025), Cahyati (2024), dan Pratiwi (2025) menunjukkan bahwa generasi muda menghadapi tantangan rendahnya literasi demokrasi, meskipun mereka hidup di lingkungan pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan teoritis mengenai demokrasi Pancasila dengan praktik nyata dalam kehidupan berorganisasi. Ketika prinsip musyawarah tidak dijalankan secara utuh, mahasiswa berisiko mengembangkan pola pikir bahwa kekuasaan dapat diraih dengan cara-cara yang tidak etis. Jika hal ini tidak diredam sejak dini, maka kampus dapat menjadi tempat berkembangnya bibit-bibit perilaku politik tidak sehat.

Penelitian Alwan & Warsono (2021) mengkaji penerapan Demokrasi Pancasila, khususnya nilai kerakyatan dan musyawarah mufakat, dalam pemilihan Ketua Umum Himnas PPKn 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pemilihan diklaim menggunakan prinsip musyawarah, praktiknya banyak bergeser ke voting, yang menyebabkan suara mayoritas lebih

menentukan dan pendapat minoritas kurang diperhatikan. Dominasi kelompok tertentu serta keputusan yang sering berlandaskan suara terbanyak membuat nilai Pancasila seperti kesetaraan pendapat, upaya mufakat, dan semangat kekeluargaan tidak terlaksana dengan optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa proses pemilihan ketua di organisasi mahasiswa belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai kerakyatan yang seharusnya menjadi dasar dalam Demokrasi Pancasila.

Menurut Nurjanah, dkk (2023) kerakyatan diinternalisasikan melalui pendidikan nilai Pancasila yang menjadi landasan moral calon pemimpin, serta pendidikan kepemimpinan yang mengedepankan penghormatan terhadap pendapat berbeda dan pengambilan keputusan secara musyawarah. Proses pemilihan juga dikelola dengan aturan demokratis dan pengawasan panitia independen untuk menjaga keterbukaan dan keadilan. Meskipun terkadang suara mayoritas lebih dominan daripada musyawarah mufakat, pelajar diorganisasi diajarkan untuk menghargai perbedaan dan bertanggung jawab secara kolektif dalam pengambilan keputusan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran demokrasi dan pemahaman nilai Pancasila yang kuat, menciptakan lingkungan organisasi yang inklusif dan berkeadilan. Secara keseluruhan, jurnal menegaskan bahwa nilai kerakyatan dalam organisasi kampus diwujudkan melalui pendidikan demokrasi Pancasila yang efektif, meskipun dalam pemilihan ketua masih ada tantangan pelaksanaan musyawarah mufakat. Penerapan nilai ini membentuk generasi pemimpin yang demokratis, berintegritas, dan menghormati hak serta tanggung jawab anggota organisasi.

Berawal dari kegelisahan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis penerapan nilai kerakyatan dalam proses pemilihan ketua organisasi kampus, khususnya ketika proses tersebut tidak dijalankan sesuai prinsip musyawarah. Penelitian ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan wawancara langsung kepada mahasiswa untuk memahami sejauh mana pemahaman mereka mengenai nilai kerakyatan, bagaimana mereka melihat praktik pemilihan ketua organisasi, serta apa saja potensi penyimpangan yang terjadi di lingkungan mereka.

Melalui penelitian ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami nilai kerakyatan sebagai konsep dalam materi Pendidikan Pancasila, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan berorganisasi. Penelitian ini juga bertujuan memperkuat budaya demokrasi kampus dengan menanamkan kesadaran bahwa musyawarah bukan sekadar prosedur, melainkan pedoman moral yang harus dijalankan untuk menciptakan keputusan yang adil, bijaksana, dan berpihak pada kepentingan bersama. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membentuk lingkungan organisasi kampus yang lebih demokratis, berintegritas, dan sesuai dengan nilai Pancasila.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu sosialisasi dan wawancara semi terstruktur. Sosialisasi dilaksanakan di area Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan, tepatnya di sekitar Gedung Fisika dan Gedung Biologi pada Kamis, 20 November 2025. Pada tahap ini peneliti menyampaikan materi mengenai nilai kerakyatan dan prinsip musyawarah dalam organisasi kampus secara lisan untuk memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa. Selama sosialisasi berlangsung, peneliti juga melakukan observasi langsung untuk melihat respons peserta, serta memberikan pertanyaan lisan guna mengetahui pemahaman mereka tentang musyawarah.

Tahap kedua adalah wawancara semi-terstruktur yang dilakukan kepada enam mahasiswa sebagai sampel penelitian. Wawancara ini bertujuan menggali secara lebih mendalam pandangan mahasiswa mengenai penerapan musyawarah dalam pemilihan ketua organisasi, pengalaman mereka dalam proses pengambilan keputusan, serta persepsi mereka mengenai transparansi dan keadilan dalam pemilihan. Semua jawaban dicatat secara manual, kemudian dikelompokkan berdasarkan tema seperti musyawarah, partisipasi, transparansi, dan persepsi penyimpangan untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Dengan dua tahapan ini,

penelitian memperoleh data yang cukup lengkap, natural, dan relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di area kampus yang berlokasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, tepatnya di sekitar Gedung Jurusan Fisika dan Gedung Jurusan Biologi, yang merupakan lingkungan akademik aktif dan sering digunakan sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa dari berbagai program studi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa area tersebut merupakan titik strategis yang dekat dengan ruang aktivitas mahasiswa sehingga memudahkan pelaksanaan sosialisasi dan pengumpulan data. Selain itu, lokasi ini memiliki suasana yang kondusif untuk diskusi dan wawancara karena jauh dari keramaian pusat kegiatan kampus namun tetap mudah dijangkau oleh peserta. Dengan kondisi lingkungan yang tenang dan nyaman, proses penyampaian materi sosialisasi mengenai nilai kerakyatan serta pelaksanaan wawancara dapat berlangsung secara efektif, sehingga peneliti mendapatkan data yang lebih jujur, alami, dan mendalam dari responden.

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Setelah sosialisasi dilakukan, beberapa temuan penting muncul dari pertanyaan-pertanyaan lisan:

1. Menurut mahasiswa, proses diskusi sebelum pemilihan sudah cukup terbuka karena setiap anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat.
2. Menurut mahasiswa, kesempatan bagi setiap calon untuk memaparkan visi dan programnya membuat proses pemilihan terasa lebih objektif.
3. Menurut mahasiswa, musyawarah dapat mengurangi konflik karena semua perbedaan pendapat dibahas terlebih dahulu sebelum voting dilakukan.
4. Menurut mahasiswa, transparansi panitia dalam menjelaskan aturan dan mekanisme pemilihan membuat mereka lebih percaya pada hasil akhir.
5. Menurut mahasiswa, keterlibatan seluruh anggota organisasi dalam musyawarah sangat penting agar keputusan benar-benar mewakili kepentingan bersama.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil sosialisasi dan wawancara yang dilakukan kepada enam mahasiswa FMIPA di area Gedung Fisika dan Gedung Biologi, terlihat bahwa pemahaman mereka mengenai nilai kerakyatan khususnya prinsip musyawarah sudah cukup baik. Hal ini tercermin dari jawaban para peserta yang menunjukkan bahwa mereka mengenali musyawarah sebagai proses berdiskusi bersama untuk mencapai keputusan yang adil dan menguntungkan seluruh anggota. Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Putri, Cahyati, dan Pratiwi bahwa musyawarah tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi merupakan wadah pembelajaran nilai demokrasi, kebersamaan, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan organisasi.

Dari hasil wawancara, mahasiswa menyatakan bahwa proses diskusi sebelum pemilihan biasanya memberi ruang bagi seluruh peserta untuk menyampaikan pendapat. Hal ini menunjukkan adanya praktik partisipatif yang sudah sesuai dengan indikator nilai kerakyatan, yaitu keterlibatan seluruh anggota dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kesempatan bagi calon untuk menyampaikan visi dan program juga dianggap membantu proses penilaian secara objektif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa transparansi dan keterbukaan mulai diterapkan pada beberapa kegiatan organisasi kampus.

Namun, hasil ini juga menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa masih sebatas pada pengalaman personal mereka, sehingga mereka belum sepenuhnya menyadari potensi penyimpangan yang dapat terjadi ketika musyawarah tidak dijalankan secara utuh. Ketika

seluruh peserta menyatakan tidak pernah melihat ketidaksesuaian atau permasalahan dalam proses pemilihan, hal ini dapat mengindikasikan bahwa literasi kritis mahasiswa terkait demokrasi kampus masih terbatas. Mereka mungkin belum mampu mengenali bentuk-bentuk ketidakadilan prosedural, seperti dominasi pendapat kelompok tertentu, tekanan tidak langsung, atau kurangnya informasi dalam proses pemilihan. Temuan ini mendukung pandangan Cahyati dan rekan-rekan bahwa praktik musyawarah yang baik membutuhkan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar mahasiswa mampu memahami bukan hanya prosedurnya, tetapi juga nilai moral yang mendasarinya.

Selain itu, pandangan mahasiswa bahwa musyawarah dapat mengurangi konflik menunjukkan adanya kesadaran bahwa dialog terbuka merupakan cara efektif untuk menyeimbangkan perbedaan pendapat. Hal ini sesuai dengan gagasan Pratiwi bahwa proses musyawarah mengajarkan kemampuan mendengar, menghargai pendapat orang lain, dan mencapai keputusan secara bijaksana. Sementara itu, apresiasi mahasiswa terhadap transparansi panitia menunjukkan bahwa kejelasan mekanisme pemilihan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap hasil keputusan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa nilai kerakyatan dalam bentuk musyawarah sudah dipahami dan telah diterapkan pada beberapa kegiatan organisasi mahasiswa, namun masih diperlukan sosialisasi lanjutan agar mahasiswa lebih kritis dalam melihat potensi penyimpangan ke depan. Data menunjukkan bahwa praktik musyawarah yang baik memang dapat menciptakan suasana yang inklusif, mengurangi konflik, dan memperkuat legitimasi keputusan organisasi. Dengan memperkuat pendidikan mengenai nilai kerakyatan sebagaimana ditegaskan oleh Putri, Cahyati, dan Pratiwi, mahasiswa dapat menjadi agen demokrasi yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan bersama.



Gambar 1. Foto Bersama Audiens

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui sosialisasi dan wawancara terhadap enam mahasiswa di sekitar Gedung Fisika dan Gedung Biologi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai nilai kerakyatan, khususnya prinsip musyawarah, sudah berada pada kategori baik. Mahasiswa mampu menjelaskan bahwa musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan yang mengutamakan diskusi bersama, keterlibatan semua anggota, serta transparansi dalam pelaksanaannya. Temuan ini sejalan dengan pandangan Putri, Cahyati, dan Pratiwi yang menegaskan bahwa musyawarah tidak hanya sekadar prosedur, tetapi juga sarana pendidikan demokrasi yang membentuk sikap kritis, kebersamaan, dan tanggung jawab moral.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa menilai proses pengambilan keputusan melalui musyawarah dapat menciptakan rasa adil, mengurangi potensi konflik, serta meningkatkan kepercayaan terhadap hasil keputusan. Meskipun demikian, pemahaman kritis terhadap potensi penyimpangan belum sepenuhnya berkembang, sehingga mahasiswa cenderung belum menyadari kemungkinan ketidakadilan yang dapat muncul apabila prinsip musyawarah tidak dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, pendidikan dan sosialisasi nilai kerakyatan masih perlu diperkuat agar mahasiswa mampu memahami musyawarah bukan hanya sebagai kegiatan formal, tetapi sebagai nilai yang dijalankan secara konsisten dalam kehidupan berorganisasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar pemahaman mahasiswa tentang nilai kerakyatan khususnya prinsip musyawarah terus diperkuat melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi terbuka. Pihak kampus maupun organisasi perlu memberikan ruang dialog yang lebih inklusif agar setiap anggota dapat menyampaikan pendapat tanpa tekanan. Mahasiswa juga diharapkan lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan sehingga nilai musyawarah tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan berorganisasi. Dengan keterlibatan semua pihak, praktik pengambilan keputusan di lingkungan kampus dapat berjalan lebih adil, terbuka, dan sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwan, M. Z. (2021). Penerapan Demokrasi Pancasila Dalam Proses Pemilihan Ketua Umum Himnas Ppkn Pada Kongres Dan Rakernas Di Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 218-232.
- Cahyati, B. S., Zahra, F. A., Naima, N., & Hasanah, N. (2024). Menjadi Generasi Maju dengan Memahami Demokrasi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 687-693. https://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/1192?utm_source=
- Darmawati., Syahril., & Harianti Inda. (2023). Integritas Moral dalam pengambilan keputusan di desa Bontobaru Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 14(1), 49-60.
- Jannah, A., Harahap, I. M., & Maidiana. (2024). Peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 37-43. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i2.857>
- Megawati, M. (2024). *Demokrasi Permusyawaratan Pancasila*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. https://eprints.uad.ac.id/67431/1/Demokrasi%20Permusyawaratan%20Pancasila%20%281%29_compressed.pdf?utm_source=
- Nurjanah, M., Azizah, A. N., Umimah, S., Setiabudi, D. I. (2023). Penerapan Pendidikan Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Ketua Organisasi Pelajar Ma'had Al-Zaytun (Opmaz) Di Ma'had Al-Zaytun. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2). <http://jurnal.anfa.co.id>
- Putri, A. H. Y., Asmaroini, A. P., & Cahyono, H. (2025). Integrasi Nilai Demokrasi dalam Pendidikan Pancasila bagi Generasi Alpha. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 50-56. https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/id/article/view/1754?utm_source=
- Pratiwi, E. D., Darmawan, D. D., Fachrudin, F. A. N., Suganda, F. A., & Sundawa, D. (2025). Pancasila-Based Democratic Education and Civil Society Development amid Indonesia's Democratic Regression. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 11(2), 146-159. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/38273?utm_source=

- Suandika, I. G. K. S., & Gorda, A. A. N. O. S. (2024). Analisis proses pengambilan keputusan oleh pemimpin dalam menciptakan komitmen organisasi. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 14(1), 240-253. <https://doi.org/10.30588/jmp.v14i1.1681>
- Taqiuddin, H, U., Mulianah, B., Solatiah, B. (2023). Organisasi Kemahasiswaan Sebagai Wadah Pembelajaran NilaiNilai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Riset Intervensi Pendidikan*, 5(1). 37-43. <http://journal.rekarta.co.id/index.php/jrip/>